

MEMBELA KEMANUSIAAN DARI TEOLOGI PENDIDIKAN KE TEOLOGI KEKUASAAN

Musa Marengke
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ternate
Jl Dufa-dufa Pantai Ternate Maluku Utara
musamarengke.mm@gmail.com

Abstract

This writing tries to analyze the concept of humanitarianism and theology dimension in education and power. The power in this writing is more refers to political attitude of elite bureaucrate and government as educated elite man. The approach used is philosophy and phenomenology to analyze the aspect of substance and reality to find out the new ideas in the discourse of education and power. Theology becomes key word of education and power. That means the substance of education and power have the sameness in theology that is appreciation for humanitarianism, yet the reality shows that the identity is not running linear all the time. Theology education becomes the syntetis that will collaborate with "theology power" become the future for humanitarianism.

Kata Kunci: humanitarianism, theology, education and power.

A. Pendahuluan

Apakah manusia perlu dibela?. Fritjof Capra, mengatakan pada awal dua dasawarsa terakhir abad keduapuluh, umat manusia telah menemukan dirinya berada dalam krisis global. Suatu krisis multidimensi yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan manusia: kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, sosial, politik, ekonomi, teknologi dan pendidikan.¹ Dibidang kekuasaan misalnya, kuatnya hegemoni kekuasaan, telah "menyulap" manusia menjadi "pesuru mekanistik" kekuasaan. Manusia bertindak seperti robot piramid kekuasaan yang kemudian hilang esensi sufistiknya. Perilaku manusia

¹ Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1998), h. 25

berubah menjadi penyembah kekuasaan, dan kekuasaan dijadikan sebagai alat kapitalis, materialisme dan hedonisme yang pada akhirnya membentuk manusia menjadi buas, dan korup, bahkan binatang lebih mulia dari kamu manusia. Diktum sosial politik menegaskan “semakin lama orang berada pada kekuasaan maka semakin cenderung untuk bertindak in-konstitusi, in prosedural, tidak ada keadilan, a-moraliti dan sederetannya “. Standar-standar kemanusiaan yang dimilikinya hilang tanpa berbekas.

Oleh karena itu, daya tarik kekuasaan membuat manusia mengalami keterpecahan pribadi (splite personaliti), manusia pecah menjadi bagian-bagian yang tidak mempunyai identitas nama yang sesungguhnya. Padahal manusia dalam terma pendidikan *zuhud*,² adalah manusia yang tidak terpecah, ia makhluk suci yang memiliki potensi untuk menolak kekuasaan yang hampa. Artinya pendidikan zuhud di era modern, salah satunya adalah sikap protes sosial yang harus ada pada manusia. Prinsip *cogito ergo sum* yang berasal dari tradisi teologi Cartesian, telah memberikan pikiran baru bagi para penguasa, konseptor dan para pemimpin untuk memposisikan kemanusiaan sebagai penjumlahatan Tuhan di bumi. Istilah pegawai, istilah presiden, pejabat, atasan, bawahan, politisi, ekonom, guru, dosen dan sebagainya, adalah manusia dalam struktur yang mesti berfungsi melegitimasi struktur kearah “ibna’ binafsik” (pemberdayaan kemanusiaan) dan bukan cita- ideologisasi strukturalis.

² Secara etimologi berarti *ragaba, 'ansyai'in wa tarakahu*, artinya tidak tertarik terhadap sesuatu. Sebagai bagian dari tasawuf modern. Zuhud adalah maqam (tempat proses pematangan) kemudian salah satunya diberi makna protes sosial dan gerakan sosial yang efektif. Lihat, H.M. Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), h.1 & 3

Arif Budiman pernah melakukan polemik seputar ideologi kekuasaan kapitalisme dan sekularisme. Menurut Arif, baik kapitalisme maupun sosialisme, sama-sama memiliki persoalan yang belum terpecahkan. Kapitalisme menghadapi masalah kesenjangan dan pemerataan, sedangkan sosialisme menghadapi demokratisasi.³ Ideologi sosialis dan kapitalis pernah menjadi kiblat masyarakat global dalam membangun peradaban manusia namun orang bukan semakin sadar terhadap eksistensi dalam struktur tetapi manusia semakin hampa spiritual dan hilang eksistensinya. Jika demikian, timbul pertanyaan, apakah teologi pendidikan dapat menjadi aspek utama dalam membela kemanusiaan dari kekuasaan?. Tulisan ini mencoba membahas tentang pembelaan terhadap manusia dari “ kekuasaan” dalam sudut pandang teologi pendidikan, dengan pendekatan filosofi dan fenomenologi.

B. Teologi Pendidikan: Sebuah idealitas Ilahiyah.

Harus diakui bahwa umumnya orang memahami pendidikan sebagai suatu kegiatan mulia yang selalu mengandung kebajikan dan berwatak netral-obyektif, namun dunia pendidikan terkejut, ketika asumsi yang mengandung kebajikan dan kemuliaan itu harus mendapat kritik mendasar dari Paulo Freire dan Ivan Illich diawal tahun 1970-an. Gagasan Freire dan Illich telah menyadarkan banyak orang bahwa pendidikan yang selama ini hampir dianggap sakral dan penuh kebajikan ternyata mengandung juga penindasan.⁴ Kalau

3 Maksum (ed), *Mencari Ideologi Alternatif*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan,1999), h.2

4 William F. O'neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, cet. ke-2, (Yaogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. x

demikian, apakah pendidikan telah hilang konsep humanis dan kesemestaan?

Teologi pendidikan dipersepsikan dalam esay ini adalah *proses nilai dan gerakan kemanusiaan* yang bisa melalui lembaga pendidikan maupun non lembaga formal. Pendidikan adalah sebuah proses yang *bersumber* dari nilai kemanusiaan, *dalam* proses kemanusiaan kemudian *menuju* nilai kemanusiaan. Jadi teologi pendidikan menegaskan pendidikan itu adalah memproses kemanusiaan menjadi milik bersama. Kemanusiaan bukan berada di ruang hampa akan tetapi bersemi dalam diri manusia struktur itu (sebagaimana dijelaskan di atas) sehingga yang disuarakan adalah auman-auman kemanusiaan yang melahirkan butiran-butiran kearifan kemanusiaan seperti keinsafan bersama, keadilan bersama, kebahagiaan bersama, demokrasi bersama, berkuasa bersama dan kesejahteraan bersama yang pada akhirnya muncul manusia yang memiliki komitmen ketuhanan dan integritas yang sempurna.

Teologi pendidikan memandang bahwa selama ini ada upaya untuk mereduksi manusia ibarat “benda-benda” sehingga hidup bersama seperti di atas sulit tercipta dan makhluk yang tidak sempurna religius. Konsekwensinya, manusia harus dikontrol dan ditata sedemikian rupa agar betul-betul menjadi manusia yang baik. Disini terjalin relasi psikologis antara kuasa-menguasai dalam dunia pendidikan.

Dalam perspektif Islam, manusia tidaklah identik dengan binatang. Manusia, menurut al-Qur’an, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Q.s.95: 4), dan makhluk yang mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya (Q.s.17:70). Agama bagi penulis, merupakan konsep ajaran yang dinamis dan tugas pendidikan adalah “merekayasa” nilai kedinamisan itu

menjadi ajaran yang progresif-kontekstual.⁵ Karenanya pendidikan dikategorikan sebagai faktor utama yang mampu membebaskan manusia dari segala jenis penghambaan dan penindasan kekuasaan. Misalnya agama melarang manusia (pejabat negara) melakukan korupsi kemudian mematuhi berarti ia berada dalam “proses pematangan kesimpulan”. Proses pematangan itu melibatkan daya nalar, jiwa dan daya lingkungan sehingga keterlibatan itulah menghasilkan “gerakan idealitas menuju gerakan identitas”. Sistem peralihan inilah yang disebut dengan “proses nilai”. Pendidikan dan kemanusiaan, adalah dua identitas yang tercipta dari satu esensi. Pendidikan selalu (seharusnya) berhubungan dengan tema-tema dan problem kemanusiaan. Artinya, pendidikan (pendidikan formal atau non formal) diselenggarakan dalam rangka memberikan peluang bagi pengakuan derajat kemanusiaan, minimal, manusia dihargai sebagai manusia. Pendidikan diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya. Menurut Paulo Freire, pendidikan merupakan ikhtiar untuk mengembalikan fungsi pendidikan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan yang dialami oleh masyarakat,⁶ menghindari segala penindasan terhadap derajat manusia sama dengan mengangkat teologi kemanusiaan dalam pendidikan. Teologi pendidikan menolak

5 Hemat penulis, agama adalah konsep ajaran, doktrin dan nilai. Konsep-konsep itu teroperasionalkan secara sistimatis dan tugas manusia adalah mempertahankan, menjaga dan mengembangkan sebagai satu kehidupan dengan dirinya.

6 Firdaus M. Yunus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial-Paulo Freire*, Y.B. Mangunwijaya, cet. ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. VIII

materialisme,⁷ manusia dihargai sebagai sebuah esensi ke-Tuhanan yang diberikan porsi utama dalam rangka meletakkan konsep khalifah dalam dunia nyata. Manusia khalifah adalah makhluk totalitas yang memiliki keseimbangan kualitas iman, dan tugas pendidikan adalah menciptakan pendidikan keseimbangan sehingga melahirkan manusia yang seimbang pula.

Pendidikan keseimbangan lebih merujuk pada aspek struktur esoterik, diarahkan pada penggalian potensi sadar manusia agar mengetahui dan menyadari konsep keseimbangan dalam Islam. Istilah dunia-akhirat, tinggi-rendah, dosa-pahala, atasan-bawahan, kuasa-menguasai dan sebagainya merupakan term pendidikan dalam Islam dalam rangka tercipta kesadaran sistematika-struktur kehidupan. Ia bukan bejana kosong melainkan mempunyai isi antara konsekwensi kemerdekaan, konekwensi independensi, konsekwensi humanistik dan konsekwensi kesetaraan dengan konsekwensi immaterial (kesadaran ber-Tuhan). Konsep teologi ini menghadirkan sosok manusia sebagai rahmat publik, menghargai hak publik, menghormati Hak-Hak Azasi manusia dan memiliki prinsip “keseimbangan” yang oleh Al-Qur’an menggunakan konsep “Ummatan Wasyatan” (umat pertengahan).

Menurut tafsiran M.Quraish Shihab (pakar tafsir), “Ummatan Wasyatan” adalah sebuah sikap tengah. Misalnya sikap kesediaan berada ditengah-tengah antara dua orang atau dua kelompok dalam persetujuan politik yang bertikai, antara terkaya dan termiskin dan atau juga sikap orang yang berbuat

7 Paham Materialisme yang memandang hakikat manusia sebagai unsure materi belaka, agaknya sulit untuk mengakui adanya unsure rohaniah dalam diri manusia, Lihat, H. Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.16

baik dan tidak berbuat dosa dan sebagainya. Oleh sebab itu, Pendidikan berwawasan kemanusiaan pada dasarnya adalah pendidikan yang menekankan pada perhatian terhadap individu manusia secara utuh, tidak hanya sebatas pada dimensi psikologis, motorik, atau pengetahuannya saja, namun pada keutuhan antropologis dengan segala karakteristik fisik dan psihisnya serta karakteristik sosial budayanya dalam rangka menciptakan jati diri yang sempurna. Untuk mengembangkan daya-daya manusia tersebut bisa melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan merupakan pembudayaan atau “enculturation”, suatu proses untuk men-tasbih-kan seseorang untuk mampu hidup dalam suatu sistem sosio- budaya tertentu. Konsekwensi dari pernyataan ini, maka praktek pendidikan harus sesuai dengan ajaran agama, budaya, tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan hanya untuk manusia dan tujuan pendidikan adalah terciptanya manusia khalifah. Sasaran pendidikan tentang ketuhanan ini (ketauhidan) akan menumbuhkan ideologi, idealitas, cita-cita dan perjuangan. Dan wawasan pendidikan tentang manusia akan menumbuhkan kearifan, kebijaksanaan, demokratis, egalitarian, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan sebaliknya menentang anarkisme, kekuasaan tirani dan kesewenang-wenangan. Sementara pendidikan berwawasan kealaman, akan melahirkan semangat dan sikap ilmiah, sehingga menghadirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesadaran yang mendalam untuk melestarikannya. John Dewey dalam *Democracy and education* berpendapat, pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup (*a necessity of life*), salah satu fungsi sosial (*a social function*), sebagai bimbingan (*a direction*), dan sebagai sarana pertumbuhan (*as growth*) yang mempersiapkan dan membentuk

disiplin hidup melalui transmisi pendidikan, baik formal maupun non formal.⁸

Dengan demikian, teologi pendidikan menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Minimal dalam empat idealitas pendidikan, yaitu: integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar budaya kuat. *Pertama*, pendidikan integralistik diharapkan menghasilkan manusia yang memiliki integritas tinggi, yang bisa bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, menyatu dengan dirinya dan menyatu dengan masyarakatnya. *Kedua*, pendidikan humanis dapat mensucikan hati manusia, mengembalikan manusia sebagai makhluk yang baik dan sempurna, mampu merasa dan bertindak berdasarkan nilai-nilai luhur manusia dan masyarakat yang bisa menghapus sifat rakus (korupsi), sombong, egoistic, egosentrik dan egalitarianisme. *Ketiga*, pendidikan pragmatis dapat menjawab kebutuhan hidup yang berkaitan dengan melangsungkan hidupnya, baik kebutuhan jasmani, rohani maupun daya intelektual. Dan *keempat*, pendidikan yang berakar budaya kuat, yakni sebuah proses pendidikan yang tidak melupakan akar-akar historis, akar-akar sejarah kemanusiaan dan kebudayaan suatu bangsa atau kelompok serta mempunyai harga diri dalam membangun peradaban berdasarkan budayanya sendiri.

C. Quo Vadis Lingkungan Kekuasaan; Menimbang Islam Identitas dan Islam Kebenaran.

8 A. Malik Fadjar, *Reformasi Pendidikan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Temprint,1999), h. 35

Salah satu dampak yang paling buruk dari kekuasaan kolonialisme yang melanda Dunia Islam.⁹ Islam adalah munculnya sebuah masyarakat “elit” yang lebih disebut Anak-Anak Tertipu.¹⁰ Maka tidak heran, banyak pengamat berpendapat bahwa sejak awal 1980-an, Islam menderita krisis identitas. Ancaman yang paling berbahaya bukanlah berkuasanya militer asing, tetapi invasi-kultur luar (*al-gazw al-fikr*) yang mendesak umat Islam untuk tidak percaya kepada koherensi atau validitas warisan umat Islam, terutama warisan paradigma kekuasaan yang dibangun generasi pertama.¹¹ Merxisme, komunisme, sekularisme, kapitalisme, atau liberalisme dipandang sebagai gugus-gugus kebudayaan dan peradaban asing yang dirancang untuk meruntuhkan orientasi kekuasaan kaum kelas elit terdidik. Seperti mitos superioritas Eropa telah merekayasa suksesi pemerintahan Nigeria dengan menerapkan identitas Barat seperti kapitalisme, sosialisme, marxisme, dan demokrasi, baik dalam aspek kekuasaan politik, ekonomi, sosial maupun universitas. Bagi Ziauddin Sardar, penerimaan mitos superioritas

9 Adalah sebuah istilah yang dapat didefinisikan sebagai wilayah yang berpendudukan mayoritas Bergama Islam atau negara Islam, mulai dari wilayah maroko hingga ke Indonesia dan Makkah dan madinah tetap menjadi pusat tradisional dunia Islam. Lihat Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashrof dalam bukunya *Crisis In Muslim Education* yang diterjemahkan oleh Fadhlun Mudhafir dengan judul, *Krisis Pendidikan Dunia Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2000), h.7

10 Ziauddin Sardar (Editor), *Merombah Pola Pikir Intelektual Muslim*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 81

11 Generasi Pertama, disebut juga “Zailul Qudwa’ (Generasi percontohan), yaitu generasi nabi Muhammad Saw dan Para sahabatnya, dalam membangun sebuah “model” kekuasaan dan peradaban masyarakat.

pemikiran dan praktik kehidupan sekuler (Barat) pada esensinya terletak pada dimensi kemanusiaan yang menjadi “kaca mata” paling canggih untuk seolah-olah melepaskan cara pandang dunia kontemporer yang koruptif, padahal sebenarnya justru menggelincirkan ke jurang korupsi.

Dekadensi moral dan kesombongan manusia (para pejabat) negara dalam hegemoni sistem penindasan dan ketidakadilan di Indonesia merupakan realitas yang masih mengangah. Bagi Piet Hisbullah Khaidir, indikator sosialnya yang dapat dilihat adalah korupsi, penyingkiran orang tulus dan bijak dalam kanca publik sehingga tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong rakyat, rakyat hanya sebagai pelayan penguasa dan sebagainya.¹² Sebuah analisis global dikatakan, Indonesia dalam pandangan Dunia Global sebagai negara-bangsa yang menduduki sepuluh besar dalam soal korupsi. Pertanyaannya adalah kemana orientasi kekuasaan di Indonesia? Apakah untuk membela Islam kebenaran yang senantiasa membela kemanusiaan? Atau membela Islam Identitas yang cenderung membela sistem kekuasaan yang pada akhirnya menciptakan keyakinan ideologi penguasa. Kekerasan kemanusiaan pada zaman Orde Lama, intrik antara kekuatan-kekuatan politik seperti PNI, PKI, NU, Masyumi adalah bagian dari carut-marut politik. Intervensi asing cukup membuktikan adanya ketidakberesan situasi politik dan pembangunan ekonomi. Orde Lama terus berjalan. Krisis politik, diawali krisis minyak yang kemudian menyebabkan krisis ekonomi adalah gambaran betapa rapuhnya sistem kekuasaan Orde Lama. Sementara zaman Orde Baru

12 Abdul Munir Mul Khan dkk, "INSIGHT" Membingkai Kegilaan Sebagai Kesadaran", *Jurnal Pemikiran Kebudayaan*, edisi 11, 2001, h. 22

adalah campur-baur antara praktis kapitalistik dan komunistik.¹³ Kata Liddle, ada institusionalisasi personal ruler dan birokratisasi. Ia mengajukan beberapa proposisi, diantaranya adalah piramida Orde Baru: presiden yang dominan, keterlibatan aktif militer dalam kancah politik, proses pengambilan keputusan berpusat dalam birokrasi, hubungan negara dan societal adalah kombinasi antara kooptasi dan respons-represi sehingga birokrasi yang berlaku adalah kapitalisme birokrasi.¹⁴ Perilaku birokrat Orde Baru membangun basis politiknya dengan konglomerat. Karenanya tercipta kekuasaan kapitalistik, yakni pemberian kekuasaan untuk akses ekonomi kapitalisme dan liberalisme birokrat kepada konglomerat, sedangkan konglomerat dengan membayar upeti kepada birokrat. Perubahan-perubahan tersebut, bagi Achmad Charris Zubair, telah berperan merubah manusia dalam tanggungjawabnya terhadap nilai maupun norma yang selama ini diyakininya, bisa dikatakan bahwa ada tiga pilar utama yang menopang dan cenderung dekat pada penghancuran kemanusiaan. *Pertama*, ilmu pengetahuan yang mendorong teknologi tinggi sehingga menyebabkan manusia bersifat sekuler, *Kedua*, pandangan yang berpaham liberalisme-humanisme, serta, *ketiga*, system kapitalisme dalam ekonomi.¹⁵ Jika demikian, praksis filosofi apakah yang kita lakukan terhadap

13 R. William Liddle, *Kepemimpinan dan Cultur Politik di Indonesia*, 1996.

14 Saiful Arif dan Fadhilah Putera, *Kapitalisme Birokrasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h.15

15 Achmad Charris Zubair, "Globalisasi Muhammadiyah Versus Globalisasi Kebudayaan", dalam Majalah *Suara Muhammadiyah; Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi, No.01 tahun ke 99 (1-15 Januari 2014), h.48

penghancuran kemanusiaan. Padahal penghancuran kemanusiaan samadengan meniadakan Tuhan dalam diri manusia serta meniadakan Tuhan sama dengan mematikan manusia sebelum dimatikan.

Gerakan pemikiran Teologi pendidikan muncul di Indonesia adalah akibat sebagian dari beberapa faktor diatas yang merupakan sebuah gerakan sosial protes dengan pemetaan konsep berkuasa dan dikuasai. Kehadiran istilah berkuasa dan dikuasai versi Masykuri Abdullah, adalah terutama dimasa pra-modern, sangat dipengaruhi oleh ego-sosial-politik dan ego-sosial-budaya yang melilit pandangan ulama politik. Sejarah peradaban menampilkan pihak yang berkuasa dengan konsep khalifah, amir atau sultan pada posisi kekuasaan mutlak dan kedaulatan yang berimensi Ilahi yang oleh Al-maududi adalah Teo-Demokrasi; kekuasaan yang berada di tangan Tuhan. Gagasan inilah yang membuat pengrekayasaan pihak berkuasa yang kemudian menisbatkan kekuasaan dengan kekuasaan Tuhan. Hal ini disebabkan ulama masa pramodern telah menjustifikasi khalifah atau imamah adalah lembaga politik yang dibentuk berdasarkan wahyu.

Kekuasaan harus dikembalikan pada posisi sentral dalam pemberdayaan kemanusiaan. Teologi kekuasaan menghadirkan perlunya kesadaran aplikatif atas konsep berkuasa dan dikuasai. Karena konsep ini bagi Din Syamsudin telah menjadi salah satu isu penting yang mendorong lahirnya teori-teori mengenai masyarakat ideal yang perlu tercipta dari hubungan tersebut. Dalam pemikiran politik Islam juga menampilkan dua spektrum hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Di satu sisi pandangan yang cenderung mendukung pihak yang berkuasa dan pada sisi lain pandangan yang membela yang dikuasai.

Pemilahan kuasa dan dikuasai merupakan pencarian kebenaran Islam Identitas dan Islam Kebenaran. Keduanya terpolarisasi pada dialektika politik kekuasaan dimana tema-tema kemanusiaan menjadi dilema dalam superioritas tanpa batas sehingga identitas teologi kemanusiaan dalam teologi kekuasaan menjadi ancaman serius padahal kemanusiaan bukan berada di pihak berkuasa atau dikuasai melainkan berada dalam bentangan kedua konsep tersebut. Teologi kekuasaan menjadikan kekuasaan politik sebagai instrumen penguatan cita-cita agama. Kekuasaan dan agama adalah ibarat dua sisi mata uang yang sama-sama penting dan saling memerlukan. Kekuasaan berfungsi menjembatani konsep keuniversalan agama dan agama berada di posisi kekuasaan sebagai pewarna, dan pembentuk identitas posisi kekuasaan. Keterkaitan antara kekuasaan dan agama merupakan kenyataan yang terjadi sepanjang sejarahnya. Menurut Kartono Mohamad, Agama Kristen mulai berkembang di Eropa setelah terjadi kedekatan antara agama dengan kekuasaan Romawi di abad pertama masehi. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, Paus-lah yang mengangkat dan mengsyahkan raja-raja di berbagai daerah di Eropa.¹⁶

Sebagai kekuatan moral kekuasaan, teologi kekuasaan juga menghadirkan pemetaan-pemetaan istilah Islam Identitas dan Islam Kebenaran. Abdolkarim Soroush, menegaskan bahwa gagasan Islam identitas dan Islam kebenaran bukan bermaksud membentuk agama identitas (*religion of identity*), tetapi agama kebenaran (*religion of truth*). Sikap beragama yang terakhir ini senantiasa mendorong adanya internalisasi pendidikan

16 Abdurrahman Wahid dkk, *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme-Religius di Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Hidaya,1999), h. 203

kekuasaan untuk mencari kebenaran dari manapun asalnya dan dalam konteks apapun. Beragama berarti mencari posisi kebenaran dan bukan monopoli kebenaran. Akan tetapi bila melakukan monopoli kebenaran berarti mengalami krisis identitas. Teologi kekuasaan hendak menciptakan pendidikan kekuasaan yang demokratis-manusiawi sehingga pemangku kekuasaan dapat menghadirkan tauhid (agama) sebagai keyakinan kebenaran. Islam identitas merupakan kedok identitas cultural dan respons terhadap apa yang disebut “krisis identitas”. Sementara Islam kebenaran adalah sumber kebenaran yang menunjukkan jalan keselamatan jasmani-rohani, dunia dan akhirat, keadilan, kesejahteraan dan kedamaian.

Memang disadari bahwa mungkin penguasa muslim di Indonesia memiliki identitas dan peradaban, tetapi tidak boleh menggunakan Islam demi kepentingan identitas kekuasaan dan Peradaban. Islam identitas harus tunduk pada Islam kebenaran, sebab Islam identitas dapat memberikan celah hadirnya Islam untuk kekuasaan sementara Islam kebenaran memberikan ruang lahirnya kekuasaan untuk agama (Islam). Dan kekuasaan yang Islami adalah perilaku ketauhidan. Maka secara defakto ketauhidan terhadap pendidikan kekuasaan akan melahirkan kesadaran substansi dan makna teologi transformative dan teologi pemberdayaan kemanusiaan itu sendiri. Ini berarti, pendidikan menjadi metodologi-netralisir yang mencoba melakukan pembacaan-pembacaan atas kegagalan Ideologi dan Agama-Realitas. Bukan tanpa persoalan, ideologi dan agama-realitas telah menjadi “kuasa” atas “kekuasaan”. Kekuasaan telah menjadi subyek kemanusiaan dan kemanusiaan menjadi obyek kekuasaan. Kemanusiaan yang mesti menjadi subyek atas kekuasaan berubah menjadi obyek kekuasaan. Teologi

pendidikan memandang kemanusiaan adalah konsep “nilai” yang menjadi pelaku utama yang mewarnai dinamika kekuasaan. Itulah sebabnya, pendidikan harus bertanggungjawab atas nurani dan moralitas manusia. Karenanya, sebagai penerjemah dari agama (nilai) pendidikan dituntut melakukan koreksi metodologi dan pemetaan-pemetaan strategis dalam melihat fenomena perubahan yang senantiasa merawat konsep kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan manusia.

D. Transformatif dan Pemberdayaan.

Engineer dengan kepekaan historisnya menilai, doktrin tauhid memiliki dua dimensi yaitu, pertama dimensi spiritual, menafikan penyembahan terhadap “berhala” dalam masyarakat Makkah saat itu. Kedua dimensi sosial-politik, berhubungan dengan pertahanan Nabi Muhammad terhadap dominasi kelompok-kelompok tertentu dalam bidang ekonomi. Tegasnya, tauhid tidak hanya menunjukkan keesaan Tuhan tetapi kesatuan umat manusia (ummatan wahidah) tanpa kelas sebagai kesatuan manusia (unity of mankind)¹⁷. Tauhid merupakan bukti kesatuan manusia dengan alam, manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Bahwa doktrin tauhid dalam Islam dengan pemahaman teologi yang transformative bisa dijadikan landasan bagi teologi pendidikan HAM yaitu pendidikan pemberdayaan

17 Bandingkan Ali Asghar Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 11. Isma'il Al-Faruqi menilai, tauhid sebagai esensi peradaban yang memuat dua dimensi penting, *Pertama*, dimensi metodologis yang menentukan prinsip dasar peradaban seperti unitas, rasionalisme dan toleran, *Kedua*, dimensi kontekstual, prinsip yang mendasari isi peradaban Islam. Lihat juga, Isma'il Al-Faruqi dan Lois Lamy' Al-Faruqi, Tauhid Sebagai Dasar Peradaban Islam, *Ulumul Qur'an*, Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, No.1,VII/Thn,1996, h. 43-50

yang respek terhadap isu-isu HAM dalam kekuasaan. Teologi ini tersirat semangat dan pengakuan bahwa keseluruhan eksistensi manusia sebagai satu kehidupan (single living) yang sama dengan sepenanggung dan satu tujuan menuju Tuhan. Kesadaran akan kesamaan manusia- tidak dis-kualifikasi, dis-orientasi dan pembebasan- inilah yang bisa dijadikan kendali bagi aktualisasi teologi kekuasaan-meminjam istilah An-Na'im- the principle of reciprocity, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan sebagai manusia.¹⁸

Keterkaitan antara kekuasaan dan agama merupakan kenyataan yang terjadi sepanjang sejarah. Agama islam mulai berkembang di wilayah Madinah karena kekuasaan dijadikan sebagai alat pencerahan (Legitimasi teologis-agama). Demikian pula agama Kristen mulai berkembang di eropa setelah terjadi kedekatan antara agama dengan kekuasaan romawi di abad-abad pertama masehi¹⁹. Relasi agama dan negara kemudian melahirkan perubahan kekuasaan yang transformative. (sebuah kekuasaan yang mampu menjawab kebutuhan, dinamika dan kecenderungan politik masyarakat dengan rasional-normatif). Bagi penulis, kekuasaan yang rasional-normatif, bisa menuai manusia berdimensi "satu" dan politik berdimensi banyak. Kekuasaan harus diboboti dengan satu tema besar "kemanusiaan" sebab kekuasaan akan bernilai bila konsep manusia diletakkan ditengah proses kekuasaan. Dan politik berdimensi banyak dari agama (Islam) akan melahirkan integritas kekuasaan yakni kekuasaan memiliki bobot akidah, akhlak dan syariat. Kekuasaan yang spiritual menjadikan

18 Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward and Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Reghts and International Law*, 1996, h.162-163

19 Abdurrahman Wahid dkk, *Politik Demi Tuhan*, h. 203.

manusia sebagai makhluk suci, makhluk mulia yang tidak bisa dikotori dengan dialektika kultur kekuasaan yang ada sekarang ini. Ada keyakinan publik bahwa kekuasaan yang terlalu lama berada dalam wibawa politikal man akan cenderung bertindak korup, karena tauhid tidak menjadi landasan kekuasaan serta menjadikan sesamanya sebagai eksploitatif untuk berkuasa.²⁰

Jika demikian, faktor apa sehingga orang yang berada dalam kekuasaan cenderung bertindak a-moraliti?. Padahal mereka berpendidikan keagamaan . Lalu dimanakah nilai-nilai pendidikan?. Pertanyaan inilah menghadirkan pencarian model pendidikan tertentu dalam teologi pendidikan, sebab teologi pendidikan memandang bahwa penghancuran kemanusiaan dalam “teologi: kekuasaan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, akan tetapi persoalan yang utama adalah pemikiran materialisme yang melanda orang dalam berkuasa. Orang dalam berkuasa dinobatkan sebagai pemegang kendali pemikiran hedonis dan individualistik yang tentunya tidak mungkin mengingkari ibu kandungnya sendiri (materialisme). Hal ini ibarat wabah penyakit yang menggorogoti syaraf-syaraf pemikiran normative-idealitas dalam pendidikan . Segala sesuatu dipandang ideal hanya dari sisi kepantasan normative materi kekuasaan sehingga orang yang berada dalam kekuasaan dengan begitu mudah mencampakkan kemanusiaannya serendah-rendahnya, bahkan binatang lebih mulia dari manusia. Fenomena ini menjadi tontonan publik bahwa orang yang berjatuh dari kekuasaan disebabkan karena hilangnya teologi pendidikan yang dilaluinya. Terjadi gesekan antara teologi pendidikan dengan “teologi” kekuasaan yang pada akhirnya orang harus jatuh pada pilihan kenistaan dalam kekuasaan. Orang yang berbuat nista

20 Abdurrahman Wahid dkk, *Politik Demi Tuhan*, h. 123

bisa dilakukan melalui kekuasaan dan “marwah kemanusiaan bisa didapat dari kekuasaan pula apabila kekuatan teologi yang dimiliki sejak pendidikan menjadi landasan integritas diri. Orang yang menghancurkan kemanusiaan misalnya orang korupsi, tidak berbuat adil, tidak menegakkan hukum, tidak memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tidak memberikan kesejahteraan, sikap menyombongkan diri dan lain sebagainya adalah pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang berpendidikan.

Dalam teologi pendidikan menegaskan, orang yang berbuat zalim dalam kekuasaan samadengan menzalimi dirinya sendiri, siapa yang menabur benih kebaikan akan memetik buah-buah kebaikan dan siapa yang menabur benih kezaliman maka tentunya memetik pula buah kezaliman. Konsep “teologi” antara pendidikan dan kekuasaan mestinya menjadi titik temu dalam membela kemanusiaan, dimana pendidikan mengajarkan tentang bagaimana pentingnya integritas diri dan pemikiran kemanusiaan yang dimulai dari kesadaran diri. Keberhasilan Rasul di dalam beragama karena memiliki metodologis pendidikan kekuasaan yang sangat piramid-privatisasi, yakni pendidikan dimulai dari “dalam” (inward) diri Rasul dan istrinya kemudian “keluar” (softward) untuk berkuasa. Jadi kekuasaan rasul dalam tahta kerasulannya bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan dan bukan pula jubah materialisme melainkan untuk membentangkan keadilan dan kesejahteraan untuk kemanusiaan. Kemanusiaan menjadi pilar-pilar peradaban yang ditanamkan melalui wadah -wadah pendidikan.

Menurut A.Malik Fadjar, pendidikan berkisar antara dua dimensi hidup manusia, yaitu: penanaman rasa takwa kepada

Allah dan pengembangan rasa kemanusiaan kepada sesama.²¹ Rasa takwa diarahkan pada kepatutan seluruh perintah beribadah, sedangkan pengembangan rasa kemanusiaan diarahkan pada terciptanya hubungan sosial yang baik. Kesadaran kemanusiaan itu, adalah konsep aplikasi dari teologi pendidikan yang mencoba memetakan manusia kedalam ruang-ruang ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manusia menjadi berarti karena faktor kemanusiaan. Dan manusia “berada” karena bersama dengan orang lain. Eksistensi manusia bukanlah eksistensi yang statis tetapi senantiasa “menjadi”. Manusia selalu bergerak dari kemungkinan ke kenyataan. Misalnya, hari ini sebagai sesuatu yang mungkin, maka besok akan berubah menjadi kenyataan. Gerak ini disebut perpindahan yang bebas, yang terjadi dalam kebebasan dan keluar dari kebebasan. Dalam al-Qur’an, eksistensi manusia yang dinamis, digambarkan dalam drama kosmis penciptaan Adam yang mendapat “protes” dari malaikat, karena manusia diketahui sebagai makhluk yang berpotensi jahat dan bersikap lalai sehingga dapat melakukan kerusakan di bumi. Namun Tuhan mungkin lebih yakin akan potensi baik yang cenderung pada kebaikan dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, teologi pendidikan kemudian memosisikan kekuasaan manusia sebagai fitrah positif²², yang senantiasa berupaya mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan nilai-nilai estetis, etis dan religius yang dimilikinya. Kekuasaan menurut teologi pendidikan adalah bejana kreasi untuk

21 A. Malik Fadjar, *Reformasi Pendidikan Islam*, h. 7

22 Menurut, Al-Gazali, Fitrah adalah inti dari sifat alamiah manusia yang ingin mengetahui dan mengenal Allah yang tidak terbawa oleh pengaruh-pengaruh yang menyimpang dari kebenaran dan dituntun oleh kebenaran itu sendiri. Lihat Ali Isa Otman, *Manusia menurut Al-Gazali*, (Bandung: Pustaka,1981), h. 28

kamusiaan yakni keadilan tanpa penindasan. Karenanya, manusia harus “menjadi” pencipta kekuasaan sejati. Pandangan ini menjadi penekan teologi pendidikan agar orang dalam kekuasaan bisa lebih humanism. Orang yang berada dalam kekuasaan adalah mereka yang telah melalui proses pendidikan “nilai”. Pendekatan logika kelembagaan berarti seseorang telah berada pada “nilai-nilai” selama 16 tahun formal. SD=6 tahun, SMP=3 tahun, SMA=3 tahun dan perguruan tinggi=4 tahun ditambah dengan pendidikan non-formal, katakanlah selama masa dua kali lipat dari pendidikan formal, maka secara kualitatif pendidikan, seseorang telah menempuh proses pendidikan nilai selama 32 tahun. Adalah sebuah proses nilai yang sebenarnya harus “berada” dalam perilaku manusia yang berkepribadian luhur, berbudi dan berakhlak. Atau dengan kata lain, masa berlingkungan pendidikan seseorang itu lebih efektif untuk sebuah pemberdayaan dan transformasi pendidikan dalam kekuasaan.

Sistim pendidikan yang dinilai gagal dalam menamkan nilai-nilai pendidikan di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pendidikan merupakan garis strategis untuk meningkatkan kualitas bangsa. Ada keyakinan bahwa kemajuan beberapa negara di dunia ini merupakan akibat perhatian para pengambil kebijakan yang besar dalam mengelola sektor pendidikan. Secara kuantitatif, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan. Data statistic pendidikan memperlihatkan bahwa di jenjang SD jumlah siswa yang terdaftar meningkat dari 13.023.000 pada tahun 1967/1968 menjadi 29.236.283 pada tahun 1997/1998 atau tercatat kenaikan sebesar 224,5 persen. Di jenjang SLTP jumlah siswa meningkat dari 1.000.000 menjadi 9.227.891 atau terdapat peningkatan sebesar 902,3 persen. Di jenjang SLTA

jumlah siswa meningkat dari 500.000 menjadi 4.932.083 atau tercatat kenaikan hampir 100 persen dalam periode yang sama. Demikian pula di perguruan tinggi, jumlah mahasiswa meningkat dari 230.000 menjadi 2.703.896 atau terdapat peningkatan sebesar 1.176 persen dalam periode tiga dasawarsa, namun secara kualitatif perkembangan pendidikan dinilai masih memprihatinkan. Menurut data dari United Nations Development Project (UNDP) tampak semakin menurun. Indonesia yang semula berada di urutan 102 namun kemudian menurun ke urutan 109, disbanding dengan Singapura urutan 34 ke 24, Australia dari urutan 11 ke 4, Filipina dari urutan 95 ke 64, China dari urutan 121 ke 99, dan Vietnam dari urutan 121 ke 108.²³

Realitas perkembangan pendidikan Indonesia menunjukkan lemahnya manajemen pendidikan, disamping sistem pemerintahan dalam memandang pendidikan. Setiap pergantian menteri pendidikan nasional, secara otomatis berganti pula kebijakan pendidikan di Indonesia. Analisis lebih lanjut, setiap pendidikan yang dikelola oleh negara maka faktor politis-negara sangat dominasi. Seperti, negara-negara timur tengah. Pendidikan bukan hanya menjadi salah satu faktor utama pendukung terjadinya perubahan di timur tengah, tetapi secara luas dipandang sebagai alat kekuasaan yang memungkinkan pencapaian tujuan sosial dan pribadi.²⁴ Pendidikan yang diharapkan menjadi obat penyembuhan penyakit setiap individu dan masyarakat juga sudah terkontaminasi oleh virus kekuasaan. Rezim orde baru bahwa mungkin era reformasi menjadikan pendidikan sebagai instrument melanggengkan kekuasaan lewat

23 Kompas, 16 April 1999, h. 3

24 Achmad Djainuri, *Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam*, cet. ke-1, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2001), h. 2

indoktrinasi politik. Akibatnya pendidikan nasional tidak lagi berdiri di atas rasionalitas pemberdayaan manusia melainkan sebuah lembaga yang anti demokrasi.²⁵ Perilaku kekuasaan inilah sudah cukup menjadi alasan bahwa pendidikan di Indonesia sangat rendah.

Kualitas pendidikan dikategorikan sebagai mutu pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sehingga pendidikan diorientasikan pada tuntutan dan lapangan pekerjaan (berdasarkan pesanan pasar). Sistem pendidikan tersebut, menyebabkan pendidikan lebih dipacu aspek intelek (otak). Ketimbang aspek nurani (rohani) yang berusat dalam kesadaran. Hal tersebut telah lama berlangsung di Indonesia, padahal paradigma pendidikan tersebut dicangkok dari paradigma pendidikan Amerika dan Jepang. Ketidakseimbangan pendidikan intelek dan nurani melahirkan ketimpangan pendidikan dalam diri manusia. Pemikiran pendidikan semacam ini boleh disebut sebagai pemikiran pendidikan liberal, yang memberikan peluang lahirnya manusia yang congkak ketika berkuasa. Studi internasional yang dilakukan oleh *The Political and Economic Risk Conculancy* yang berpusat di Hong Kong menunjukkan, Indonesia berada pada urutan kesetarus sebagai negara paling korup di Asia. Indikator ini memberi kesan kuat bahwa pendidikan mengakibatkan gagal menanamkan akhlak moral manusia Indonesia. Hal ini tentu mengagetkan banyak kalangan karena masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Namun Indonesia dengan skor yang hampir

25 Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi; Tantangan Menuju Civil Society*, cet. ke-1, (Yogyakarta: 2000), h. 9-11

sempurna untuk korupsi, 9,91 persen mengungguli india dengan skor 9,17, china 9,0, dan Vietnam 8,5 persen.²⁶

Gagasan teologi pendidikan di Indonesia sebenarnya mempertanyakan nilai-nilai pendidikan yang dilaksanakan selama ini. Indonesia sebagai mayoritas muslim seyogyanya menjadikan ketauhidan dan kemanusiaan sebagai sentral tujuan pendidikan. Namun yang terjadi tidak seperti itu, menjadikan manusia menjadi bagian-bagian yang tidak integrasi dalam pertumbuhannya. Hilangnya substansi tujuan pendidikan kepada manusia, ini menjadi salah satu faktor memicu hadirnya gagasan teologi pendidikan sebagai gerakan protes sosial atas ketimpangan yang terjadi di tingkat praksis. Dengan demikian, agenda yang dikedepankan adalah paradigm teologi transformative dalam pendidikan dengan melakukan transformasi terhadap sistem pendidikan dan struktur kekuasaan melalui pencipta relasi -sebagaimana dijelaskan diatas- yang secara fundamental membentuk kausaprima. Manusia bisa “ menjadi”, “pencipta” dan “ada bersama” bila kemanusiaan diletakkan pada diktum-diktum relasi teologi pendidikan dan teologi kekuasaan. Teologi pendidikan dan teologi kekuasaan sama-sama berpihak pada kemanusiaan yang universal. Misalnya teologi pendidikan mengharapkan tumbuhnya moral dan akhlak dan manusia demokratis dengan penciptaan iklim relasi antara pendidikan dengan hakikat manusia. Sementara teologi kekuasaan mengharapkan tumbuhnya perilaku kuasa yang humanis dan demokratis dengan penciptaan relasi antara kesadaran kekhalifahan dengan tujuan hidup manusia. Antara keduanya menjadikan hakikat

26 Winarno Surakhman, dkk, *Mengurai Benang Kusut Pendidikan; Gagasan Para Pakar Pendidikan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Transformasi 2003), h. 61

manusia sebagai makhluk suci dari Tuhan yang tidak selayaknya dikotori. Pendidikan dan kekuasaan sama-sama menjadikan manusia sebagai sasaran akhir yang secara kodrati tetap ada relasi. Hubungan timbal balik ini meniscayakan adanya proses pemberdayaan manusia. Teologi transformasi dalam pendidikan setidaknya ingin menekankan bagaimana manusia diperdaya sehingga memiliki spirit perlawanan segala bentuk penindasan kekuasaan dan pembelaan terhadap hak-hak azasi manusia. Karena itu, teologi transformatif dalam dunia pendidikan itu tampaknya ingin menganalisis penyebab kerusakan kemanusiaan karena kesalahan orientasi pembangunan pendidikan nasional dan hegemoni kekuasaan terhadap pendidikan.²⁷

Teologi pendidikan yang transformatif inilah memberikan konsep-konsep kunci pembelaan terhadap manusia. Artinya, teologi pendidikan menekankan bahwa kemanusiaan adalah esay-esay yang harus berpentingan semua orang untuk menegakkannya di atas kekuasaan yang pada akhirnya tercipta keadilan, kesejahteraan, dan tanpa kezaliman. Manusia tidak bisa dimatikan melalui kekuasaan dan harus dihidupkan melalui pendidikan, memberikan konsep-konsep pemberdayaan dengan melakukan mobilisasi di segala bidang. Katakanlah, lembaga pendidikan formal, penekanan teologi pendidikan adalah harus terjadi transformatif minimal dalam enam mobilisasi perubahan. *Pertama*, Ideologi-normatif pendidikan mampu memberikan wawasan dan memperkuat komitmen kemanusiaan dan kekuasaan dalam berbangsa dan bernegara. Maka yang ditekankan adalah pembaharuan system pendidikan nasional.

27 Piet Hisbullah H "Keberpihakan Islam Terhadap Kemanusiaan", dalam *Tanwir* Jurnal Pemikiran Agama dan Peradaban, Edisi 3, Vol. 1, No. 3, September 2003). h. 39

Kedua, mobilisasi politik. Tugas pendidikan adalah memobilisasi pembangunan dengan penekanan pada perbaikan operasional dari orientasi kurikulum yang berbasis 'Mata hati".

Ketiga, Pemikiran pendidikan berfahaman progresifitas akan melahirkan gerakan pemikiran untuk pembangunan. Pemikiran ala Sunni dengan garus pemikiran Asy-Ariyah telah menyebabkan stagnasi, sebagaimana dikatakan Azyumardi Azra dalam bukunya *Berteologi di Indonesia*, bahwa proses pembangunan secara umum di Indonesia, teologi Asy-Ariyah harus bertanggungjawab atas kemandekan atau keterlambatan proses pembangunan disegala bidang. Gagasan pemikiran teologi Asy-Ariyah ini dipandang tidak menyehatkan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Indonesia.

Keempat, Mobilisasi ekonomi. Pendidikan sebagai alat penjawab kebutuhan manusia, maka teologi pendidikan menekankan bahwa ker-kerja-kerja pengawetan "tyarnsfer dan transmisi" ilmu-ilmu tidaklah cukup melainkan penanaman harkat manusia.

Kelima, mobilisasi sosial. Salah satu identitas yang diyakini dalam pendidikan transformative adalah bahwa tugas pendidikan adalah produsen dan bukan konsumen. Pendidikan bertindak sebagai pemutar siklus peradaban dan bukan sebagai kondektur yang mengikuti alur putaran sosial. Ini berarti konsep-konsep sosial dalam pendidikan dapat dijadikan kerangka acuan dalam mendesain sebuah siklus sosial-budaya yang edukatif.

Keenam, Mobilisasi kultural. Pendidikan sebagai proses pembudayaan maka kultur indoktrinasi dan kuasa-menguasai dalam pendidikan dapat diformulasikan dengan doktrin-doktrin teologi kemanusiaan. Mobilisasi pendidikan sebenarnya bertumpuk pada transformasi perilaku ke kultur kekuasaan. Pendidikan untuk

Kemanusiaan yang menjadi bekal hidup bagi yang berkuasa sekaligus diorientasikan menjadi cita-cita *rahmatan lil alamiin*.

Dengan demikian, mobilisasi pendidikan sebenarnya bertumpuk pada transformasi perilaku manusia dari dunia pendidikan ke kultur kekuasaan sehingga konsep kemanusiaan menjadi kuasa yang mendoktrinasi kultur kekuasaan. Kemanusiaan yang menguasai kekuasaan akan melahirkan kesetaraan kesemestaan. Ini yang disebut sebagai konsep islam-rahmatan lil'alamin. Islam sebagai rahmat bagi semesta akan menepis islam konseptual yang dinilai tidak mampu merubah system dan menghadirkan konsep islam actual yang dinilai mampu mengubah system, karena islam actual terdapat pada aktualisasi perilaku pemeluknya.²⁸ Transformative seperti ini menuntut penempatan iman pada basis rasionalitas kekuasaan. Manusia akan mampu menemukan landasan moral kemanusiaan dari suatu system kekuasaan.

E. Penutup

Teologi pendidikan lebih bernuansa proses kesadaran kemanusiaan, dimana kekuatan humanis menjadi penentu dan tolak ukur dalam berbagai segi kehidupan manusia, termasuk dunia kekuasaan politik. Pendidikan kemudian dipandang sebagai sebuah kekuatan yang mampu memberikan pencerahan dan pencerdasan serta membentuk peradaban masa depan. Meskipun demikian, pendidikan dalam realitas sosial sering dipahami hanya sebagai alat kekuasaan dan alat untuk berkuasa. Padahal asal pendidikan adalah suci dan mulia. Kemudian itu karena pendidikan memiliki konsep kemanusiaan sejati yang berorientasi pada ketajaman intelek dan kejernihan rohani. Maka

28 Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, (Bandung: Mizan,1991), h. 1

pendidikan seharusnya harus “menjadi dan pencipta” pribadi, terutama pesan-pesan filosofi kekuasaan. tarikan kekuasaan sering menjadi pemasalahan tersendiri ketika berkuasa, pendidikan dan manusia dihubungkan dalam pemetaan-pemetaan perilaku kekuasaan politik. kemanusiaan adalah subyek dari kekuasaan dan kekuasaan adalah obyek dari kemanusiaan. Kesadaran tersebut menjadi agenda teologi pendidikan untuk melakukan pemetaan-pemetaan strategis..

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Toward and Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights and International Law*, 1996\
- Al-Faruqi, Isma'il dan Lois Lamya' Al-Faruqi, Tauhid Sebagai Dasar Peradaban Islam, *Ulumul Qur'an*, Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, No.1,VII/Thn,1996, h. 43-50
- Arif, Saiful dan Fadhilah Putera, *Kapitalisme Birokrasi*, Yogyakarta: LKiS, 2001\
- Djainuri, Achmad, *Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam*, cet. I, Surabaya: Al-Ikhlash, 2001
- Fadjar, A. Malik, *Reformasi Pendidikan Islam*, cet. I, Jakarta: Temprint,1999
- Husain, Syed Sajjad dan Syed Ali Ashrof, *Crisis In Muslim Education* yang diterjemahkan oleh Fadhlan Mudhafir dengan judul, *Krisis Pendidikan Dunia Islam*, cet. I, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2000
- H. Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001
- Capra, Fritjof, *Titik Balik Peradaban*, cet. I, Yogyakarta: Benteng Budaya,1998
- Liddle, R. William, *Kepemimpinan dan Cultur Politik di Indonesia*, 1996.
- Maksum (ed), *Mencari Ideologi Alternatif*, cet. I, Bandung: Mizan,1999
- O'neil, William F, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, cet. II, Yaogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Otman, Ali Isa, *Manusia menurut Al-Gazali*, Bandung: Pustaka,1981
- Piet Hisbullah H "Keberpihakan Islam Terhadap Kemanusiaan", dalam *Tanwir* Jurnal Pemikiran Agama dan Peradaban, Edisi 3, Vol. 1, No. 3, September 2003). h. 39
- Sardar, Ziauddin (Editor), *Merombah Pola Pikir Intelektual Muslim*, cet. I, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Surakhman, Winarno, dkk, *Mengurai Benang Kusut Pendidikan; Gagasan Para Pakar Pendidikan*, cet. I, Yogyakarta: Transformasi UN,2003
- Syukur, H.M. Amin, *Zuhud di Abad Modern*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000

Wahid, Abdurrahman, dkk, *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme-Religius di Indonesia*, cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah,1999

Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi; Tantangan Menuju Civil Society*, cet. I, Yogyakarta: 2000